Telaah Interkoneksi Konsep Istihsan dan Konsep Maqasid al-Syariah

Lasan

Mohammad Hafid

(Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As Salafiyah Sumber Duko Pamekasan,
lasanmasduqi@gmail.com, Sangtasangsang04@gmail.com,)

Abstrak:

Setelah menela'ah pengertian konsep al-Istihsan dan Maqasid al-Syariah, nampak jelas keterhubungan konsep al-Istihsan dengan Maqasid al-Syariah. Hal itu dapat dibuktikan dalam hakikat pengertian konsep al-Istihsan yang bertumpu pada titik peralihan suatu dalil terhadap dalil lain. Sebab jika hal itu tidak dilakukan maka akan terjadi kekosongan nilai keadilan dan kemaslahatan dalam suatu produk hukum yang digali. Sehingga akhirnya hanyalah kesulitan dan keberingasan yang termuat didalamnya. Disinilah seorang ahli hukum (Mujtahid) menggunakan daya nalarnya sembari menanyakan; apakah dalam produk hokum yang akan tergali berdasarkan suatu dalil termuat nilai-nilai maqasid al-syariah dengan mendatangkan kemaslahatan dan menolak kesulitan atau tidak? Jika jawabannya tidak, maka ia kan mencari solusi lain dengan bantuan potensi ijtihadnya dengan keluar dari metode qiyas (qaidah umum) menuju kemetode lain yang lebih responsive, dan pro-aktif demi terwujudnya prinsip-prinsip dasar penetapan syariah dengan mengutamakan kemaslahatan. Tehnik pengumpulan data dalam ini dilakukan dengan metode kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca sumber-sumber tertulis seperti buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah yang dikemukakan. Dan analisis data yang jadi pedoman merujuk ppada metode *deskriptif* dan metode *conten analisis*.

Abstract:

After examining the understanding of the concepts of al-Istihsan and Maqasid al-Syariah, it is clear that the connection between the concepts of al-Istihsan and Maqasid al-Syariah is clear. This can be proven in the nature of the understanding of the concept of al-Istihsan which rests on the point of transition from one proposition to another. Because if this is

not done, there will be a void in the value of justice and benefit in a legal product that is being explored. So that in the end only difficulty and violence contained in it. This is where a legal expert (Mujtahid) uses his reasoning power while asking; Does the legal product that will be explored based on a proposition contain the values of maqasid al-syariah by bringing benefit and rejecting difficulties or not? If the answer is no, then he will look for another solution with the help of his potential ijtihad by moving away from the qiyas method (general qaidah) to another method that is more responsive, and pro-active for the realization of the basic principles of sharia determination by prioritizing benefit. The technique of collecting data in this is carried out by the library research method, namely research conducted by reading written sources such as books and books related to the problems raised. And the data analysis that becomes the guideline refers to the descriptive method and the content analysis method.

Kata kunci: Telaah Interkoneksi, Konsep Istihsan, Konsep Maqasid al-Syariah

Pendahuluan

Interaksi antara wahyu dan rasio dapat membentuk dinamika hukum Islam. Kemudian, berkembang menjadi ijtihad yang diartikan dengan upaya ilmiah dalam menggali dan menemukan hukum bagi hal-hal yang tidak ditetapkan hukumnya secara tersurat (*manshus*) dalam syariah (*Al-Kitab Wa Sunnah*). Dari sana diketahui bahwa, sumber hukum Islam terdiri atas: al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan akal. Selain dari sumber hukum primer tersebut, dikenal juga adanya sumber-sumber sekunder (*al-Mashadir al-Tab'iyah*), yaitu: syariah terdahulu (*syar' man qablana*), pendapat sahabat Nabi (Qaul al-Shahabi), Kebiasaan/Adat-Istiadat (Al'urf), Istishlah, Istishhab dan Istihsan.¹

Melacak akar sejarah dan perumusan konsep dapat ditemui bahwa ia muncul dari permasalahan qiyas. Ini menarik, karena kadang Qiyas, dalam beberapa kondisi tidak bisa dipaksakan dalam menetapkan hukum. Faktornya bisa saja ketidak terpenuhan syarat atau ada hal lain. Misalkan, *illat* qiyas yang akan dijadikan sebagai pautan dalam penyamaan hukum bagi persoalan tertentu tidak dapat diterapkan karena tidak sebanding. Oleh

¹ Ali Yafie, KH., *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah: Kosep-konsep Istihsan, Istishlah, Dan Mashlahat Al-Ammah* (Edit.) Budhy Munawar-Rachman, (Jakarta: Yayasan paramadina), 1994, 362

karena itu, harus diselesaikan dengan cara lain yang lebih mendekati tujuan syara".²

Penuturan Ahmad Hasan, bahwa pada periode sebelum munculnya imam empat mazhab qiyas itu masih digunakan secara sangat sederhana. Batasan-batasan mengenai unsur pokoknya belumlah muncul. Pada masa itu, qiyas hanya merupakan sebuah kasus yang analog.³ Sehingga, akibat cakupan qiyas yang terlalu luas, maka penggunaan qiyas pada masa itu terkadang menghasilkan putusan hukum yang tidak logis dan bahkan menimbulkan ketidakadilan, serta tidak dapat mewujudkan kemaslahatan sebagai tujuan umum hukum syara".⁴

Sebagai contoh, ijihad ulama Irak yang mengqiyaskan hukum pembunuhan terhadap perempuan yang berkhianat dengan pembunuhan perempuan di daerah musuh. Dalam masalah ini, ulama Irak menetapkan bahwa perempuan yang berkhianat tidak boleh dibunuh karena Rasul melarang pembunuhan terhadap perempuan di daerah musuh. Analisa qiyas seperti ini tidak logis, karena apabila perempuan berkhianat tidak boleh dibunuh, mengapa perempuan yang berzina harus dibunuh dengan hukuman rajam? Oleh karena itu, untuk memelihara keutuhan qiyas sebagai dalil hukum dan tetap terpeliharanya keadilan serta terwujudnya kemaslahatan, maka ahli hukum Irak, Imam Abu Hanifah menciptakan metode instinbat hukum lain yang lebih dekat dengan ra"yu, yaitu metode hukum istihsan.⁵

Secara historis, sesungguhnya sebelum Abu Hanifah mempergunakan Istihsan, istilah tersebut sudah lebih dahulu dipergunakan oleh ulama-ulama sebelumnya. Salah satunya adalah Iyas bin Mu"awiyah seorang hakim dalam pemerintahan Bani Umawiyah pernah berkata, sebagaimana dikutip oleh Hasbi ash-Shiddieqy⁶:

² Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), Cet.1, 142

³ Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, terjemahan dari buku "The Early Development of Islamic Jurisprudence", (Bandung: Pustaka, 1984), 127

⁴ *Ibid*,

⁵ *Ibid*, 134

⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), Cet. I, 287

Telaah Interkoneksi Konsep Istihsan

“Gunakanlah Qiyas sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan sesuai dengan apa yang baik untuk seluruh manusia, apabila hasilnya tidak baik, gunakanlah istihsan. Saya tidak pernah menemukan putusan hukum melainkan apa yang dipandang baik oleh manusia.”

Setelah Abu Hanifah menjadi seorang mujtahid dan filosof dalam bidang hukum, barulah istilah tersebut sering dipergunakan untuk menyaingi qiyas. Beliau sendiri tidak menegaskan definisi Istihsan, hanya dipahami dari pendapatnya yang menyatakan bahwa istihsan sebagai dalil hukum yang digunakan untuk menentang qiyas dan menguatkannya bila bertentangan dengan qiyas.

Hal ini kemudian menjadi suatu kelemahan bagi Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan murid-muridnya yang ketika beristihsan mereka tidak menerangkan tentang hakikat dalil istihsan dan apa yang mereka kehendaki dengan dalil tersebut. Boleh jadi, karena pada masa itu fokus perhatian para mujtahid bukan pada penamaan atau pendefinisian atas istilah-istilah hukum yang baru muncul, namun lebih kepada bagaimana menemukan suatu hukum atas masalah-masalah yang belum ada ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Dengan demikian nampaknya Istihsan menjadi kontroversial setelah pernyataan Imam Abu Hanifah untuk mendahulukan istihsan daripada qiyas, tanpa menjelaskan panjang lebar alasan di balik keputusannya tersebut. Tentu saja hal ini mengundang reaksi keras terutama di kalangan ulama ahli hadits termasuk al-Syafi'i dan menuduh tindakan sang Imam sebagai bentuk "arogansi" terhadap nash.⁷

Karenanya, serangan al-Syafi'i yang amat tajam adalah ketika beliau mendengar Istihsan dipakai oleh pengikut-pengikut Abu Hanifah yang berdiskusi dengan beliau tanpa menerangkan apa yang dimaksudkan dengan istihsan itu. Dalam arti mereka tidak dapat mengemukakan dalil mengenai istihsan lantaran mereka bertaklid kepada imam-imam mereka. Tatkala al-Syafi'i menanyakan kepada mereka apa hakikat istihsan, mereka tidak dapat menjawabnya.⁸

⁷ Alauddin Abd al-„Aziz al-Bukhari, *Kashf al-Asrar „an Usul Fakhr al-Islam al-Bazdawi*, Tahqiq : Muhammad al-Mu"tasim billah al-Baghdadi, (Beirut : Dar al-Kitab al-„Arabi, 1991), Juz IV, 8

⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam...291*

Namun sekalipun perbincangan tentang perselihan konsep Istihsan begitu ramai dikalangan ahli ushul, kita harus tahu bahwa semua metode ijtihad bermuara pada upaya penemuan maslahat dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit baik dalam al-Qur'an maupun hadits Nabi Muhammad Saw. Atas dasar asumsi ini, maka dapat dikatakan bahwa setiap metode penetapan hukum yang dipakai oleh para ahli ushul fiqh bermuara pada *maqashid al-syari'at*.

Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjamin persoalan-persoalan hukum kontemporer. Lebih dari itu, tujuan hukum perlu diketahui dalam rangka mengetahui apakah terhadap suatu kasus masih dapat diterapkan satu ketentuan hukum atau, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat lagi diterapkan. Menurut al-Juwaini, seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia dapat memahami benar tujuan Allah menetapkan perintah dan larangan-Nya.⁹

Pada dasarnya tujuan utama disyariatkan hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari kemafsadatan baik didunia maupun diakherat. Ia bertujuan untuk melindungi dan mengembangkan perbuatan-perbuatan yang lebih banyak mendatangkan kemaslahatan, dan melarang perbuatan-perbuatan yang membawa pada bahaya dan pengorbanan yang tidak semestinya. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individu dan sosial.

Segala macam kasus hukum baik yang secara eksplisit diatur di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah maupun yang dihasilkan melalui ijtihad, harus bertitik tolak dari tujuan tersebut. Dalam kasus hukum yang secara eksplisit dijelaskan di dalam kedua sumber utama tersebut, kemaslahatan dapat ditelusuri melalui teks yang ada. Jika ternyata kemaslahatan itu dijelaskan maka ia (kemaslahatan) itu harus dijadikan titik tolak penetapan hukumnya. Kemaslahatan seperti ini biasanya disebut dengan *al-maslahat al-mu'tabarat*.

Berbeda halnya jika kemaslahatan itu tidak dijelaskan secara eksplisit dalam kedua sumber itu, maka peranan mujtahid sangat menentukan untuk

⁹ Fathurahhman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih...37*

menggali dan menemukan “maslahat” yang terkandung dalam penetapan hukum. Pencarian “maslahat” ini sangat penting dalam menemukan hukum, karena penemuan maslahat adalah merupakan penemuan jiwa daripada nash.

Kemaslahatan yang dikehendaki adalah kemaslahatan yang hakiki dan yang bersifat umum, bukan yang bersifat pribadi. Maslahat inilah yang menjadi hikmah hukum yang dicita-citakan oleh syara’ dalam membina hukum. Dengan demikian, hikmah suatu hukum syara’ adalah untuk mewujudkan maslahat dan menolak kemudharatan. Bahkan menurut Abu zahrah, sebagaimana dikutip Asrafi, bahwa tidak ada satupun hukum yang disyariatkan baik dalam al-Qur’an dan as-Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.

Kemaslahatan yang dimiliki oleh manusia dipahami sebagai sesuatu yang relatif, tidak absolut. Karena itu, ketentuan apakah sesuatu itu menguntungkan atau membahayakan adalah relatif, satu sama lain dibedakan oleh besarnya resiko yang ada pada masing-masing perbuatan. Dilain pihak, kemaslahatan dan bahaya tidak harus selalu relatif, kebolehan dan pelarangannya, masing-masing ditentukan oleh sebuah paradigma dan bukan atas dasar pertimbangan kemaslahatan manusia semata di dunia.

Pertimbangannya adalah berdasar pada konstruksi dari sebuah sistem hukum yang berkenaan dengan tingkah laku manusia, yaitu menyiapkan seseorang untuk hidup di akhirat, dan membawa manusia secara personal untuk melaksanakan perintah Tuhan serta mengendalikan hawa nafsu. Inilah sebenarnya alasan dari diturunkannya syari’ah. Oleh sebab itu, apapun bentuk perbuatan yang hanya didasari pertimbangan pribadi dan bertentangan dengan nash ataupun semangat hukum sama sekali dilarang.

Berbicara tentang kemaslahatan tidak bisa dilepaskan dengan *maqāshid as-syar’iyyah*, karena maslahat adalah merupakan inti dari pembahasan *maqāshid as-syar’iyyah*. Secara teoritis *maqāshid al-syar’at* mengetengahkan ide dasar disyariatkannya hukum Islam dengan maksud melindungi (*muhafzhhah*) atau menjamin (*taklifi*) kelangsungan hak dan keseluruhan system kehidupan meliputi lima aspek yang paling asasi. Kelima aspek yang paling asasi (*usu al-kamsah*) itu adalah (i) *muhafazah al-din* (kepentingan agama), (2) *al-nafs* (jiwa), (3) *al-aql* (akal), (4) *al-nasl* (keturunan), dan (5) *al-mal* (harta).¹⁰

¹⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam...*291

Dari beberapa penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa konsep al-istihsan sebagai bagaian dari salah satu metode ijtihad adalah upaya melalui pemikiran yang mendalam untuk menetapkan hukum pada suatu peristiwa baru yang tak tersurat dan tak tersirat dalam nash, demi menciptakan kemaslahatan bagi manusia yang merupakan ruh dari tujuan syariah (maqasid al-syariah). Mengingat bahwa kejadian-kejadian pada zaman dulu tidak sama dengan peristiwa-peristiwa pada sekarang ini. Apalagi era kontemporer ini muncul masalah-masalah baru yang sama sekali pada saat Nabi hidup tidak ada. Oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk menela'ah Keterhubungan Konsep al-Istihsan dengan Konsep Maqasid al-Syariah.

Tehnik pengumpulan data dalam ini dilakukan dengan metode kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca sumber-sumber tertulis seperti buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah yang dikemukakan.¹¹ Dan analisis data yang jadi pedoman merujuk ppada metode *deskriptif* dan metode *conten analisis*.

Pembahasan

A. Hubungan Konsep al-Istihsan dengan Maqasid al-Syariah dalam Segi Pengertian

Setelah menela'ah pengertian konsep al-Istihsan dan Maqasid al-Syariah, nampak jelas keterhubungan konsep al-Istihsan dengan Maqasid al-Syariah. Hal itu dapat dibuktikan dalam hakikat pengertian konsep al-Istihsan yang bertumpu pada titik peralihan suatu dalil terhadap dalil lain. Sebab jika hal itu tidak dilakukan maka akan terjadi kekosongan nilai keadilan dan kamaslahatan dalam suatu produk hukum yang digali. Sehingga akhirnya hanyalah kesulitan dan keberingasan yang termuat didalamnya.

Disinilah seorang ahli hukum (Mujtahid) menggunakan daya nalarnya sembari menanyakan; apakah dalam produk hokum yang akan tergali berdasarkan suatu dalil termuat nilai-nilai maqasid al-syariah dengan mendatangkan kemaslalahatan dan menolak kesulitan atau tidak?

¹¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1991), Cet. V, 30.

Jika jawabannya tidak, maka ia akan mencari solusi lain dengan bantuan potensi ijtihadnya dengan keluar dari metode qiyas (qaidah umum) menuju ke metode lain yang lebih responsive, dan pro-aktif demi terwujudnya prinsip-prinsip dasar penetapan syariah dengan mengutamakan kemaslahatan.

Dengan artian konsep al-istihsan merupakan sebuah metode yang dipakai oleh mujtahid untuk merealisasikan tujuan penetapan syariah (maqasid al-syariah). Penjelasan di atas dikuatkan oleh Imam Malik, dengan menyatakan; “orang yang terlalu menyelam dalam pemakaian qiyas hampir meninggalkan sunnah. Padahal konsep al-istihsan dalam segala bentuk dan dimensinya selalu saja mementingkan kemaslahatan dan keadilan¹², bukan dengan cara brutal dan hawa nafsu serta bukan tak berlandaskan dalil syar’i. Jika yang terjadi sebaliknya sudah ditolak. Hal inilah yang dimaksudkan oleh Imam Syafi’i bahwa barang siapa yang beristihsan sudah pasti membuat-buat syariah. Akan tetapi faktanya syariat itu ada untuk mengeluarkan manusia dari kungkungan hawa nafsu.

Dari gambaran dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa semua kelompok baik yang menerima ataupun menolak konsep al-istihsan sebagai metode istimbat hokum islam sama-sama menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar (maqasid al-syariah) penetapan syariah islam. Kelompok yang menerima konsep al-istihsan sebagai metode penetapan hokum islam merimanya dengan cara menanggalkan qiyas disebabkan adanya metode lain yang lebih kuat dan lebih dekat dengan tujuan syariah (maqasid al-syariah). Maka dengan pemakaian konsep al-istihsan otomatis lebih mengena dan pro aktif terhadap tujuan syariah (maqasid al-syariah). Yaitu kemaslahatan objek hokum (mukallaf). Dan kemaslahatan itu akan lebih nampak bersamaan dengan dalil yang lebih kuat, sementara pemakaian qiyas terkesan bringas dan tidak bersentuhan dengan tujuan syariah (maqasid al-syariah) bahkan menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan.

¹² Ibnu Rusdy, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid....*

Sedang orang yang menolaknya sebagai metode penetapan hukum islam berdasarkan pemahaman bahwa konsep al-istihsan ditengarai sebagai salah satu cara menjustifikasi dengan cara serempangan dan tanpa dalil syar'i. dalam hal ini juga berdasarkan tujuan syariah (maqasid al-syariah) karena fungsi syariah adalah untuk mengeluarkan mukallaf dari belenggu hawa nafsu dan akal semata tanpa menggunakan dalil syar'i. sedangkan qiyas, merupakan bagian dari dalil syar'i yang patut dijunjung dalam penetapan sebuah hukum islam kecuali ada dalil yang lebih kuat maka diperbolehkan pindah menuju pada metode lain. Dan jika peralihan dari qiyas ke metode lain (beristihsan) berdasarkan hawa nafsu sudah pasti ditolak.

Berdasarkan hal itu, maka konsep al-istihsan merupakan cara, metode dan sarana untuk mewujudkan prinsip-prinsip dasar (maqasid al-syariah) penetapan syariah islam guna menjaga kemaslahatan mukallaf dan menghilangkan kesulitan. Jika hal demikian memang betul-betul terjadi maka apakah hal itu juga terjadi pada setiap bagian-bagian konsep al-istihsan? Jawabannya dapat kita temukan dalam kajian selanjutnya.

B. Hubungan Konsep al-Istihsan dengan Maqasid al-Syariah dalam Segi Bentuk dan Bagiannya

Setelah kita mengetahui hubungan konsep al-istihsan dengan maqasid syariah dalam segi pengertian dan maknanya, penulis mencoba menelaah hubungan konsep al-istihsan dengan maqasid al-syariah dalam segi bentuk dan bagiannya, karena kita tahu bahwa konsep al-istihsan yang dilegalkan, memiliki bagian-bagian khusus. Apakah tiap-tiap bagian istihsan dapat bersinergi dengan maqasid al-syariah atau ada yang tidak sama sekali bersangkutan paut dengannya. Untuk lebih jelasnya penulisnya menelaah satu persatu dari perbagian konsep al-istihsan sebagai berikut:

1. Melacak Maqasid al-Syariah dalam Konsep al-Istihsan dengan Nash Syariat islam datang dengan membawa kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Ia tidak akan pernah kosong darinya. Ia selalu saja terikat dengan prinsip-prinsip dasarnya yang menjadi ruh dan nyawa keberadaannya. Jika kita menemukan sebuah nash yang menuntut sebuah hukum tertentu maka sudah pasti didalamnya terkandung nilai-nilai maqasid al-syariah berupa kemaslahatan bagi seluruh pemeluknya dan jika hal itu tak dapat kita temukan dalam satu

kondisi dan berarti ia tidak dimaksudkan pada kondisi itu dan harus mencari dalil lain yang dapat melahirkan maqasid al-syariah. Ambil contoh, qiyas merupakan dalil legal yang dijadikan pegangan dalam penetapan sebuah hukum, sudah pasti didalamnya terdapat nilai-nilai maqasid al-syariah, dan jika hal itu absen, yang ada hanyalah kesulitan dalam metode qiyas maka harus mencari metode lain sebagai dalil yang dapat melahirkan kemaslahatan.

Dalil lain tersebut bisa saja berupa Alquran, dan bisa saja juga berupa hadist, keduanya sebagaimana kita ketahui merupakan dalil primer yang selalu kita kedepankan dalam praktek penetapan hukum. Sedang qiyas hanyalah dalil yang lahir dibawah pangkuannya dengan berdasarkan ijtihad dan penggunaannya pun dibatasi oleh keduanya.

Maka secara kasat mata qiyas ditinggalkan dan tidak boleh dipakai ketika tidak berani menetapkan maqasid syariah. Karena kita tahu qiyas hanyalah cabang sedang nash (al-qur,an dan hadist) adalah dasar. Sudah pasti indikasi terhadap hukum tertentu yang temuat didalamnya masih bersifat zdanni sedang indikasi dalam sebuah nash sudah diatas itu, yaitu bersifat qath'i. sesuatu yang bersifat qath'i otomatis lebih dekat dengan maqsid syariah karena yang membuat nash (syari') lebih tahu dari pada mujtahid. Untuk lebih jelasnya kita lihat dalam beberapa contoh aplikasi konsep al-istihsan dengan nash dibawah ini:¹³

a. Akad Ijarah

Akad ijarah jika diqiyaskan pada penjualan yang bendanya tidak nampak (bai' al-ma'dum) otomatis akan dilarang dan tak boleh dipraktekkan. Akan tetapi apakah dengan tidak dilegalkannya akad ijarah akan melahirkan *maqasid al-syariah* dengan mengundang kemaslahatan dan menolak kesulitan atau malah sebaliknya, akan terjadi kegelisahan dan kesulitan mengingat akad ijarah merupakan suatu kebutuhan yang tak bisa dihindari?

¹³ Mohammad al-Sarakhsi, *al-Mabsuth...*6, 128

Mengingat akad ijarah merupakan suatu keharusan yang tak dapat dihindari maka disini harus mencari dalil lain yang pro aktif terhadap maqasid al-syariah selain qiyas yang sudah tak dapat dijadikan pegangan karena kosong dari nilai-nilai maqasid al-syariah, jika hal itu terus dipaksakan maka akan menyulitkan. Dalil lain tersebut berupa nash, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala:

“ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ”

“Jika mereka menyusui untukmu maka berilah mereka upa”¹⁴

Maka dengan ditemukannya firman Allah diatas, qiyas yang seharusnya dipakai terpaksa harus ditinggalkan, karena keberadaannya kosong dari nilai-nilai maqasid al-syariah, sementara nash yang berupa firman Allah diatas memperbolehkan akad ijarah dan dapat mewujudkan maqasid al-syariah, yaitu terjaganya kehidupan anak yang sangat butuh terhadap asi dan asuhan seorang wanita.

Sedangkan menjaga kehidupan merupakan salah satu dari kelima pokok (dhoruriyah al-khomsah) tujuan syariah yang dilegalkan. Maka jelaslah, diperbolehkannya akad ijarah merupakan peralihan dari tuntutan dalil pertama yang berupa qiyas menuju pada nash yang berupa firman Allah diatas demi untuk demi untuk terwujudnya kemaslahatan dan kosongnya kesulitan.

b. Akad Mudharabah¹⁵

Akad mudharabah ketika diqiyaskan pada ijarah juga merupakan akad yang dilarang dan tidak boleh dilakukan, karena adanya ketidakjelasan (gharar) dalam bagian mudharib. Akan tetapi ada fakta yang berbeda bahwa disana ada orang

¹⁴ QS. Al-thalaq/6

¹⁵ Al-Mudharabah ikut wazan mufa'alah dari kata darb, artinya berjalan dibumi. Secara terminology adalah, akad dengan pemberian modal kepada salah seorang yang mampu mengembangkannya dengan pembagian hasil. Akad ini pada mulanya merupakan bentuk titipan, perwakilan dalam pengerjaannya, perseroan jika berlabab, ghasab jika ingkar janji, bidha'ah jika semua laba untuk pemilik modal dan qard jika semua laba untuk pekerja. al-Jurjani, *Al-Ta'rifat*, 278

Telaah Interkoneksi Konsep Istihsan

yang memiliki banyak modal hanya saja dia tidak memiliki keahlian untuk mengelola dengan baik, sebagaimana juga disana ada orang yang ahli dalam mengelola uang hanya saja ia tidak memiliki modal.

Jika tetap berpegang teguh pada qiyas yang berakibat pada pelanggaran mudharabah maka akan melahirkan kegelisahan dan kesulitan yang mana keduanya bertolak belakang dengan prinsip-prinsip dasar penetapan syariah. Maka sudah menjadi keharusan untuk mencari dalil lain yang legal yang bisa mengantarkan mukallaf pada prinsip-prinsip dasar penetapan syariah dengan menghapus kesulitan dan kegelisahan dimaksud menjadi kemaslahatan.

Sehingga mudharabah menjadi diperbolehkan. Dalil lain tersebut dapat dijumpai pada pengakuan Nabi Muhammad shalla al-llah alaih wa allam terhadap al-abbas bin abd. al-Muthallaib dalam hal mudharabah. Maka ditinggalkanlah qiyas demi menguak prinsip-prinsip maqasid al-syariah dari mulai menghilangkan kesulitan hingga menghapus kesempitan.

c. Lupa makan dan minum pada puasa ramadhan

Orang yang lupa makan atau minum pada bulan ramadhan jika diqiyaskan pada makan atau minum karena ada unsur kesengajaan maka puasanya batal, dan harus menggantinya dilain hari pada bulan-bulan selain ramadhan. Akan tetapi, hokum ini sama sekali tidak mewujudkan maqasid al-syariah, bahkan yang terjadi malah sebaliknya. Tidak ada tawaran kemaslahatan dalam kewajiban mengganti puasa, karena ia mencedrai kehormatan bulan ramadhan dengan makan atau minum tidak dengan unsur kesengajaan. Yang ada hanyalah kesulitan, karena harus mengganti puasa dari hari yang mana ia sudah melakukannya walaupun hanya sebagiannya. Maka dari itu hadirilah nash yang berupa hadits:

من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه

Telaah Interkoneksi Konsep Istihsan

Barang siapa lupa makan atau minum maka hendaklah terus menyempurnakan puasanya karena ia diberi makan dan minum oleh Allah¹⁶

Adanya nash hadits yang menegaskan tentang tidak batalnya puasa orang yang lupa makan atau minum sangat berkesesuaian dengan prinsip maqasid al-syariah dalam menghilangkan kesulitan dan mentitah sesuatu yang sulit dikerjakan, karena orang yang berpuasa kemudian makan disebabkan lupa sedang terjangkit gejala alam yang mempengaruhi kecakapannya dalam hokum, sehingga sangatlah sesuai jika hal tersebut tidak mempengaruhi puasanya. Bentuk kemaslahatan dalam hal ini tercermin dalam ketidak berdosaanya, karena ia melakukannya diluar keinginannya. Dan juga dapat menghilangkan kesulitan yang akan ia alami jika tidak hokum mengganti tetap berlaku. Dan menghilangkan bentuk kesulitan merupakan bagian dari kebutuhan yang dikehendaki oleh syariah (*hajiah al-maqsudah syar'an*).¹⁷

Dari adanya telaah diatas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa penggunaan qiyas dapat melahirkan kesulitan dan keberatan bagi mukallaf (orang yang cakap hokum), sehingga beralih dari penggunaan qiyas yang kosong dari maqasid al-syariah menuju pada penggunaan nash yang lebih akomodatif dan pro aktif terhadap prinsip-prinsip dasar penetapan hokum hukum (maqasid al-syariah) merupakan sebuah keharusan, agar produk hokum yang tergalai dapat menawarkan kemudahan dan kenyamanan bagi manusia. Inilah yang disebut sebagai al-istihsan bi al-nash.

2. Melacak Maqasid al-Syariah dalam Konsep al-Istihsan dengan Ijama'
Al-istihsan dengan ijma' adalah adanya nash atau kaidah umum yang menuntut adanya sebuah hokum akan tetapi keberadaan hokum tersebut kosong dari maqasid al-syariah, kemudian para ulama' sepakat untuk memalingkan beberapa produk hokum yang

¹⁶ Hadits Riwayat al-Bukhori, Bab Nadzar dan Sumpah, No. 6292

¹⁷ Mohammad al-Sarakhsi, *al-Mabsuth*...128

seharusnya masuk dalam cakupan nash tersebut berdasarkan sandaran syar'i lainnya dengan tujuan menyingkap maqasid al-syariah. Contoh konkritnya sebagai berikut:¹⁸

- a. Menyewa kamar mandi tanpa adanya batasan pemakaian air, sabun dan lainnya

Transaksi dimaksud jika dikembalikan pada qiyas (qaidah umum) tidak boleh, karena adanya ketidak tahuan, dan kebodohan dalam proses transaksi tersebut yang dapat membatalkannya. Akan tetapi, dibalik ketidak bolehan transaksi tersebut akan melahirkan kesulitan dan kegelisahan bagi manusia, sehingga ulama' menganalisa dan menelaah tentang kebodohan yang dimaksud dalam transaksi tersebut ternyata hal itu ringan dan tidak dapat mengantarkan pada perselisihan, dan keberadaannya tidak mengundang masalah. Maka menyewa kamar mandi tanpa adanya penentuan penggunaan air dan lainnya adalah sah-sah saja dan boleh dilakukan, karena didalamnya termuat kemaslahatan dan maqasid al-syariah yang menjadi ruh dari penetapan hukum islam dengan memberikan kemudahan bagi manusia. Hal inilah yang dimaksud dengan al-istihsan dengan ijma'.

- b. Akad *Ishtisna'* (pesanan)

Transaksi *ishtisna'* adalah transaksi sesuatu yang barangnya belum ada ditempat pada saat terjadinya transaksi. Secara qiyas transaksi model ini tidak diperbolehkan karena mengandung unsur ketiadaan barang pada saat akad dilaksanakan (*ba'i al-ma'dum*). Namun, kenyataan demikian dapat membuat melahirkan kesulitan besar mengingat transaksi model ini sangat dibutuhkan dalam pergaulan hidup manusia. Jadi, dengan dicegahnya transaksi model ini berdasarkan qiyas tidak sejalan dengan maqasid al-syariah, yang ada hanyalah kesulitan semata.

¹⁸ *Ibid*, 128

Maka dari itu, ulama' sepakat (beijma') memperbolehkan transaksi model ini dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dan dikecualikan dari ba'i al-ma'dum yang dilarang, demi terciptanya kemaslahatan manusia serta menghilangkan kesulitan yang dihasilkan yang keduanya merupakan ruh dari maqasid al-syariah.¹⁹

3. Melacak Maqasid al-Syariah dalam al-Istihsan dengan Dharurah
Al-istihsan dengan dharurah adalah, bentuk peralihan dari penggunaan dalil umum atau qiyas menuju penggunaan dharurah, dengan tujuan menolak kesulitan dan menampilkan kemaslahatan bagi manusia yang berinding pada terwujudnya maqasid al-syariah. Berikut beberapa contoh sebagai penjelas dari hal tersebut:²⁰

- a. Status hukum sumur yang kejatuhan barang najis
Berdasarkan dalil qiyas, sumur yang kejatuhan barang najis otomatis akan menjadi najis dan tidak memungkinkan untuk disucikan, sekalipun air yang terdapat didalamnya dikuras semuanya, kemudian disiram dengan air suci setelah dikuras, tetap saja tidak merubah statusnya. Peralihan, pinggiran dinding sumur menjadi najis saat terkena barang najis. Akan tetapi, produk hukum yang dihasilkan dari penggunaan dalil qiyas tersebut dapat mewujudkan kesulitan besar bagi manusia, karena disamping air merupakan kebutuhan mendasar, sumur juga demikian, sebagai wadah untuk menjaga mata air. Dan sudah menjadi jelas bahwa kesulitan itu harus dihindari dalam penerapan syariah karena islam secara prinsipnya tidak menghendaki hal demikian. Berangkat dari titik tolak tersebut, maka sumur yang kejatuhan barang najis menjadi suci dengan menguras sebagian air yang terdapat didalamnya. Proses penalaran seperti ini dikenal dengan al-istihsan dengan dharurah. Sehingga terciptalah penajagan apa yang seharusnya dijaga untuk manusia. Dan inilah yang dimaksudkan oleh syariah sebagai (*maqasid al-syariah*)

¹⁹ Najmuddin al-Thufi, *Sharah Mukhtashar Al-Raudhah* Juz. 2... 452

²⁰ Mohammad al-Sarakhsi, *al-Mabsuth*... 128

b. Sahnya Putusan qadhi

Jika ada salah satu qadhi, yang terangkat tanpa memenuhi criteria dan persyaratan, misalnya ia dzalim dan penipu, maka, besarkan qaidah umum hasil putusannya tidak sah dan tidak berlaku. Karena tidak memenuhi syarat sebagai qadhi. Akan tetapi, demi menjaga hak-hak dan kemaslahatan, putusannya tetap sah dan berlaku. Peralnya, manusia sangat butuh terhadap pemimpin yang dapat menjadi penengah dan hakim dalam sebuah perselisihan, untuk mengembalikan hak-hak pada pemiliknya. Jika putusannya dipaksakan tidak sah berdasarkan kaidah umum tersebut sudah pasti akan memberikan kemudharatan bagi mereka. Sedangkan bentuk kemudharat tidak sejalan dengan prinsip-prinsip maqasid al-syariah. maka dari itu, ketidaksahan harus ditiadakan dan diganti dengan kesahan, demi untuk mewujudkan maqasid al-syariah dengan menjaga kemaslahatan manusia.

4. Melacak Maqasid al-Syariah dalam al-Istihsan dengan Qiyas Khofi

Yaitu : memalingkan suatu masalah dari ketentuan hukum qiyas yang jelas (qiyas jali) kepada ketentuan qiyas yang samar (qiyas khafi), karena keberadaannya lebih kuat dan lebih tepat untuk diamalkan. kita tahu bahwa qiyas merupakan bagian dari dalil yang dilegalkan oleh syariah dan dapat menampilkan maqasid al-syariah, maka jika terdapat suatu peristiwa yang menuntut sebuah hukum dibawah naungan dua dalil yang sedikit bertentangan, satunya tidak berpotensi melahirkan maqasid al-syariah dan yang satunya sangat berpotensi melahirkannya, maka otomatis yang diutamakan dan diprioritaskan dalil yang lebih berpotensi melahirkan maqasid al-syariah. untuk lebih jelasnya dapat disimak dalam contoh berikut:²¹

a. Seseorang menyewa tanah tanpa menyinggung pengairannya dan sumbernya

Dalam kasus ini dapat didasarkan pada dua dalil, pertama kiyas jali (kiyas jelas) dan kedua dapat didasarkan pada kiyas khofi (kiyas samar). Bertandas dari kacamata kiyas jali (kiyas jelas) kasus diatas disamakan dengan jual beli dengan pemersatu

²¹Abu Bakar al-Jasshos, *al-Fushul fil Ushul*....348

keduanya sama-sama akad yang bernuansa iwad (pengganti) sehingga bentuk pengairan dan sumbernya tidak masuk dalam transaksi. Pruduk hokum yang seperti ini tentunya menyulitkan dan memberatkan bagi pihak penyewa. Namun setelah proses penalaran mendalam ternyata, masalah tersebut dapat didasarkan pada kiyas khofi (kiyas samar), yaitu dikiyaskan pada waqof, dengan pemersatu, mengeluarkan manfaat dari pemiliknnya dengan tetapnya bentuk barangnya. Akad sewa juga demikian, yaitu transaksi yang focus pada penggunaan manfaatnya tanpa menyentuh bentuk barangnya. Sedang penggunaan manfaat mustahil diperoleh tanpa pengairan dan penggunaan air yang ada didalamnya karena tujuan dari transaksi itu adalah kemanfaatn dan ia tak akan diperoleh tanpa adanya air. Tujuan penyewa inilah yang kemudian dikatakan sebagai bentuk kemaslahatan yang menjadi ruh dari maqasid al-syariah. tujuan sayariah dapat terealisasi dengan penggunaan kiyas khofi tidak dengan kiyas jali.²²

- b. Sekelompok membobol rumah dan mencuri sesuatu yang berharga yang dikeluarkan oleh seorang dari mereka
Dalam kasus ini, terdapat dua kaca mata untuk menalarnya, pertama, mengqiyaskan pada kasus pemaksaan pemerkosaan terhadap wanita oleh sekelompok orang kemudian hanya salah satu dari mereka yang melakukannya, maka kewajiban had hanya berlaku pada pelaku dan tidak wajib untuk pemaksa. Berangkat dari kiyas jali ini, orang yang wajib dipotong dalam kasus pencurian diatas adalah yang mencuri bukan yang mengeluarkan barang tersebut. Kedua, dilihat dari kaca mata kiyas khofi, kasus diatas disamakan dengan hokum pembegal jalan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang saling tolong menolong dalam pembegalan dan pembunuhan, maka hokum hadnya mengenai semua orang dalam tersebut yang ikut andil dalam pembegalan dan pembunuhan.

²² Ibrahim al-Syatibi, *al-Muwafaqat*....229

Demikian, kasus pembobolan diatas pemotongan juga mengenai semua orang yang tergabung dalam kelompok tersebut. Karena produk hokum yang didasarkan pada kacamata kedua lebih akomodatif terhadap maqasid al-syariah yang tercermin dalam penjagaan harta. Sebab jika salah satu yang mengeluarkan barang tidak dipotong, maka akan membuka jalan untuk pembobolan lain, dan konsep penjagaan harta yang menjadi ruh dari maqasid al-syariah menjadi janggal dan dipertanyakan.²³ Sebab, jika pemotongan tidak merata akan berakibat pada penyia-nyian hart manusia dan akan melahirkan permusuhan.

5. Melacak Maqasid Syariah dalam al-Istihsan dengan Urf atau Adat (Tradisi)²⁴

Syariah Islam memandang adat/urf (tradisi) manusia yang tidak berlawanan sebagai mitra dan bukan rival. Ia juga menjadi bagian darinya yang dilegalkan. Contohnya, Jika terdapat sebuah hokum yang melarang sesuatu kemudian tradisi dalam suatu masyarakat sudah biasa melakukannya dengan tanpa memberikan pertentangan yang berarti dan tanpa adanya kemudharatan.

Maka larangan tersebut pada dasarnya ditinggalkan oleh kebiasaan yang sudah berlaku. Karena jika larangan tetap dipaksakan berlaku maka akan berakibat lahirnya kemudharatan masyarakat yang sudah terbiasa melakukannya. Sedang kemudharatan itu sangat dihindari oleh penerapan syariah. sehingga masyarakat tersebut dikecualikan dari hokum larangan berdasarkan konsep al-Istihsan, demi terciptanya sebuah kemaslahatan yang menjadi adanya syariah Islam.

Contoh kasusnya adalah bai'i al-muathoh, transaksi yang hanya berdasarkan mengambil dang menerima barang tanpa adanya ijab dan qabul. Namun transaksi model ini jika dilihat dari perspektif qiyas tentunya tidak boleh dilaksanakan, karena tidak adanya unsur penting dalam jual beli, yaitu ijab dan qabul, hanya saja qiyas

²³ Abu Bakar al-Jasshos, *al-Fushul fil Ushul...* 348

²⁴ Mohammad al-Sarakhsi, *al-Mabsuth....* 128

dibekukan karena dapat melahirkan kesengsaraan dan kesulitan dalam prakteknya.

Seumpama orang yang menjual sedang melaksanakan shalat, sedang pembeli terburu-buru, andaikan transaksi seperti ini dilarang tentunya akan mematikan kemaslahatan kedua belah pihak. Jadi transaksi model ini tetap dibiasakan oleh masyarakat yang sudah biasa melakukannya, dan didalamnya tidak ada pertentangan dengan teks syariah dan juga tidak melahirkan perselisihan antar keduanya setelah transaksi. Kemaslahatan disinilah yang harus dikedepankan dengan cara menggunakan konsep al-istihsan, karena ia bagian dari maqasid al-syariah.²⁵

6. Melacak Maqasid al-Syariah dalam Konsep al-Istihsan dengan Masalah

Konsep al-Istihsan model ini, dapat ditemukan dalam semua hal yang dikecualikan dari qiyas atau kaidah umum karena factor masalah amah (kemaslahatan umum). Contohnya sebagai berikut:

Akad Qirad (utang piutang). Akad ini pada dasarnya adalah bagian dari riba, karena tergolong tukar menukar barang yang sejenis dengan disertai penanggungan penyerahan. Akan tetapi akad ini diperbolehkan dengan tujuan untuk menawarkan kenyamanan dan keluasan bagi yang membutuhkannya, karena jika akad ini tetap dilarang maka akan memberikan kesempatan dan kesulitan bagi mereka yang ingin melakukan dan butuh akad ini, sehingga kemaslahatan dan kenyamanan dari adanya hukum islam terendus dan absen. Makanya demi untuk mewujudkan kemaslahatan mereka akad dan transaksi model ini diperbolehkan.²⁶

Penutup

Setelah menela'ah pengertian konsep al-Istihsan dan Maqasid al-Syariah, nampak jelas keterhubungan konsep al-Istihsan dengan Maqasid al-Syariah. Hal itu dapat dibuktikan dalam hakikat pengertian konsep al-Istihsan yang bertumpu pada titik peralihan suatu dalil terhadap dalil lain. Sebab jika hal itu tidak dilakukan maka akan terjadi kekosongan nilai keadilan dan

²⁵ *Ibid*, 128, Abu Bakar al-Jasshos, *al-Fushul fil Ushul...*348 dan Ibrahim al-Syatibi, *al-Muwafaqat...*229

²⁶ *Ibid*, 229

kemaslahatan dalam suatu produk hukum yang digali. Sehingga akhirnya hanyalah kesulitan dan keberingasan yang termuat didalamnya.

Disinilah seorang ahli hukum (Mujtahid) menggunakan daya nalarnya sembari menanyakan; apakah dalam produk hukum yang akan tergali berdasarkan suatu dalil termuat nilai-nilai maqasid al-syariah dengan mendatangkan kemaslahatan dan menolak kesulitan atau tidak? Jika jawabannya tidak, maka ia akan mencari solusi lain dengan bantuan potensi ijtihadnya dengan keluar dari metode qiyas (qaidah umum) menuju metode lain yang lebih responsive, dan pro-aktif demi terwujudnya prinsip-prinsip dasar penetapan syariah dengan mengutamakan kemaslahatan.

Dengan artian konsep al-istihsan merupakan sebuah metode yang dipakai oleh mujtahid untuk merealisasikan tujuan penetapan syariah (maqasid al-syariah). Penjelasan diatas dikuatkan oleh Imam Malik, dengan menyatakan; “orang yang terlalu menyelam dalam pemakaian qiyas hampir meninggalkan sunnah. Padahal konsep al-istihsan dalam segala bentuk dan dimensinya selalu saja mementingkan kemaslahatan dan keadilan, bukan dengan cara brutal dan hawa nafsu serta bukan tak berlandaskan dalil syar’i. jika yang terjadi sebaliknya sudah ditolak. Hal inilah yang dimaksudkan oleh Imam Syafi’i bahwa barang siapa yang beristihsan sudah pasti membuat-buat syariah. Akan tetapi faktanya syariat itu ada untuk mengeluarkan manusia dari kungkungan hawa nafsu.

Daftar Pustaka

- Ali Yafie, KH., *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah : Kosep-konsep Istihsan, Istishlah, Dan Mashlahat Al-Ammah* (Edit.) Budhy Munawar-Rachman, Jakarta : Yayasan paramadina, 1994
- Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 1999
- Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, terjemahan dari buku “The Early Development of Islamic Jurisprudence”, Bandung : Pustaka, 1984
- Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, terjemahan dari buku “The Early Development of Islamic Jurisprudence”, Bandung : Pustaka, 1984
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2001

Telaah Interkoneksi Konsep Istihsan

Alauddin Abd al-„Aziz al-Bukhari, *Kashf al-Asrar „an Usul Fakhr al-Islam* al-Bazdawi, Tahqiq : Muhammad al-Mu„tasim billah al-Baghdadi, Beirut : Dar al-Kitab al-„Arabi, 1991

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1991